

**BULETIN**

# PARLEMENTARIA



NOMOR 902/II/IV/2016

## PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN PARLEMEN AKAN LIBATKAN BPK DAN KPK



DPR DORONG  
PERBAIKAN SARANA  
BANDARA HALIM



FAHRI HAMZAH BERI  
PENJELASAN TERKAIT  
PEMECATANNYA



PAPUA BARAT  
MILIKI POTENSI  
BESAR



## Pembangunan Perpustakaan Parlemen Akan Libatkan BPK dan KPK

Suasana forum diskusi Press Gathering Koordinatoriat Wartawan DPR

**K**etua DPR RI Ade Komarudin akan melibatkan BPK dan KPK dalam perencanaan pembangunan Perpustakaan Perlemen terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini dia lakukan agar sejak awal proses perencanaan berjalan secara transparan, dan tidak ada pelanggaran hukum dalam pembahasan anggaran pembangunan.

"Saya akan undang BPK dan KPK saya enggak mau punya gagasan besar, tapi saya dikerangkeng dan Sekjen dikerangkeng, karena ada kekhawatiran perbuatan yang tercela. Prosesnya harus jelas dan diawasi KPK, serta transparan kepada publik," papar Ade kepada para awak media saat *Press Gathering* di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/4).

Akom, begitu dia akrab disapa, menilai perpustakaan merupakan wahana untuk mengantarkan masyarakat ataupun politisi

senayan agar memiliki nalar yang cerdas, sehingga kalau ada perdebatan politik di publik, semua berjalan dengan cara yang beradab.

"Perpustakaan itu adalah kebanggaan bangsa. Meski milik DPR, perpustakaan tetap bernama Perpustakaan Parlemen," ujar Akom.

Politisi Partai Golkar ini berhasrat, jika jadi dibangun, nantinya perpustakaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi bangsa untuk meningkatkan minat membaca. "Kalau negeri ini mau maju, ya harus ada motivasinya. Kalau mau pintar, ya harus 'doyan' baca buku, harus ada semangatnya," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyastiti mengatakan rencana pembangunan perpustakaan akan dimulai dari awal kembali. Pasalnya, proyek tersebut berbeda dengan rencana

sebelumnya membangun gedung baru.

Winantuningtyastiti mengungkapkan sebelumnya telah direncanakan membangun ruang kerja anggota DPR. Tetapi sekarang akan dilakukan pembangunan perpustakaan sehingga harus mengajukan rencana baru.

"Harus ajukan anggaran dan desain baru karena berbeda analisis biayanya dari Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.

Ide pembangunan perpustakaan ini pertama kali muncul dari saran para cede kiawan yang menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPR. Mantan ketua PB-HMI Periode 1993-1998 mengatakan, usulan dari para cede kiawan itu sangat baik. Dia pun menyambut dengan tangan terbuka niat tersebut. ■



## DPR Harapkan Media Menjaga Citra Lembaga

Pemotongan rangkaian pita bunga disertai dengan ucapan 'bismillah' oleh Ketua DPR-RI Ade Komarudin menandai peresmian Media Center DPR RI Selasa (5/4/2016). Simbolisasi pemotongan tumpeng juga turut menjadikan acara semakin semarak.

"Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dengan ini kita buka bersama peresmian Media Center DPR," ujar Akom, begitu Ketua DPR biasa disapa.

Dalam peresmian ruangan awak media ini, Akom didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, dan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti serta para pejabat kesekjenan. Akom menyampaikan rasa senang hatinya kepada kesekjenan yang telah bekerja menuntaskan renovasi Media Center DPR RI.

"Saya bersama Pak Fadli, sangat senang, terimakasih kepada kesekjenan yang telah bekerja keras. Kita patut berterimakasih kepada Bu Sekjen," ungkap Akom.

Akom mengharapkan dengan diselesaikannya pekerjaan renovasi ruangan Media Center DPR, para wartawan dapat bekerja dengan baik, menjaga citra lembaga secara objektif dalam mensosialisasikan kinerja dewan kepada khalayak umum.

"Hasil kerja dewan dapat disosialisasikan dengan baik. Mulai sekarang memberitakan tentang kinerja legislasi," harap Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Politisi dari dapil Jawa Barat VII menuturkan dengan ruangan wartawan yang sudah direnovasi, sehingga nyaman digunakan untuk bekerja ini, awak media bisa bekerja sama secara baik dengan DPR



Ketua DPR Ade Komarudin saat peresmian media center

untuk membangun bangsa ini. "Kita jaga bersama, kita rawat bersama. Semua kita harus saling menghormati, agar terjalin kerjasama yang baik," tutur Akom.

Akom mengatakan meskipun ruangan wartawan bernama Media Center DPR RI, dia menghendaki para wartawan juga bisa mengcover pemberitaan MPR dan DPD. Pasalnya ketiga lembaga ini di bawah satu atap kompleks parlemen.

Akom juga menginginkan agar para wartawan yang bekerja di kompleks parlemen dapat berlaku tertib, menjaga kebersihan, keamanan dan peraturan yang sudah disepakati bersama.

Sementara itu Sekjen DPR, Winantuningtyastiti mengamanatkan, dengan renovasi dan peresmian Media Center DPR, merupakan bentuk perhatian Pimpinan DPR kepada para awak media. Dia juga mengharapkan agar wartawan DPR dapat bersinergi dengan Pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal.

"Ini juga bentuk dari perhatian Pimpinan DPR, agar wartawan lebih produktif dan memberitakan dengan baik. Ini tidak hanya menjadi ruang kerja, tapi juga diskusi untuk sosialisasi hasil-hasil kerja DPR," papar Winantuningtyastiti. ■

(eko.nti), foto:tim parle/hr.

### PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

### PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastiti, M.Si  
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

### WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,  
(DEPUTI PERSIDANGAN)

### PIMPINAN REDAKSI

Drs.Suratna, M.Si  
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

### WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti  
(Kasubag Media Cetak)  
Ahyar Tibi, S.H  
(Kasubag Media Analisis)  
Insan Abdirrohman, S.H, M.Si  
(Kasubag Media dan Website)

### REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

### SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

### ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,  
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmad Eko, Ria Nur Mega

### REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

### FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty,  
Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

### ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

### ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

### PENERBITAN & DISTRIBUSI

#### PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

#### WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE  
(Kasubag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si  
(Kasubag Distribusi)

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

#### Email

penerbitandpr@gmail.com

(isi berita dan materi foto diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)



## Pemerintah Diminta Cepat dan Taktis Atasi Pembajakan Kapal

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun sidang 2015-2016, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (06/4/2016). Dalam pidatonya dia mengungkapkan rasa prihatin dan mengutuk tindakan pembajakan terhadap kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12, yang berawak 10 ABK berkewarganegaraan Indonesia di kawasan Filipina Selatan.

"DPR mendesak Pemerintah, Kepolisian, TNI, dan aparat berwenang untuk mengambil langkah taktis dan bertindak cepat dalam mengatasi pembajakan kapal tersebut, dengan tetap mengedepankan keselamatan sandera," ujar Ade Komarudin.

Akom, sapaan akrab Ade Komarudin juga mengatakan bahwa DPR akan terus mendorong kerja sama TNI dan Polri dalam penanganan kasus seperti pembajakan tersebut, dan kasus keamanan lainnya.

"Kami memandang penting dan urgent agar TNI memperhatikan kesiapan Alat Utama Sistem Persenjataan secara menyeluruh sehingga bisa diidentifikasi alat yang layak dan tidak layak untuk

digunakan, karena akan menentukan keberhasilan operasi," tandas Politisi F-Golkar tersebut.

Atas terjadinya musibah jatuhnya pesawat Helly Bell 412 EP No. HA-5171 dalam operasi Tinombala, pada Minggu 20 Maret 2016 lalu di daerah Kasiguncu Poso, Sulawesi Tengah, DPR juga merasa ikut berduka.

"DPR ikut prihatin dan berduka atas gugurnya para prajurit terbaik. Hal ini menjadi pelajaran penting dan mahal yang tidak boleh terulang kembali," tambahnya.

Terkait aksi demo para pengemudi taksi yang menentang transportasi berbasis *online*, Ketua DPR mendorong pemerintah agar segera mengkaji secara mendalam dan menyiapkan regulasi transportasi publik secara komprehensif, termasuk transportasi berbasis *online*.

"Hal ini penting agar terwujudnya ketersediaan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman, dengan tetap memberikan peluang yang adil bagi perkembangan transportasi konvensional maupun berbasis *online*," ucap Akom.

Menanggapi maraknya eksploitasi terhadap anak, Dewan meminta Pemerintah agar lebih serius dalam melaksanakan amanat konstitusi dan UU



Ketua DPR RI Ade Komarudin

tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

"Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk ikut mewujudkan lingkungan ramah anak," tandas Akom. ■

(dep.mip) Foto: Tim Parle/hr

## Saatnya Bandara Halim Ditata



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Menyusul insiden tabrakan pesawat sipil komersil di Halim Perdanakusuma, saatnya memang bandara tersebut ditata ulang. Insiden kecil yang semestinya tidak terjadi itu, harus menjadi pelajaran berharga bagi operator bandara dan Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengomentari insiden tabrakan antara Batik Air dan Trans Nusa, Selasa (5/4) di DPR. Fadli yang ditemui usai meresmikan ruang Media Center itu, menyerukan agar transportasi udara di Bandara Halim Perdanakusuma ditata kembali.

"Saya kira ini pelajaran bagaimana penataan perhubungan kita. Kok, bisa terjadi hal-hal yang tidak perlu terjadi.

Harus diinvestigasi, di mana titik lemah dan kesalahannya," kata politisi Partai Gerindra itu.

Ditambahkan Fadli, operator dan petugas bandara yang bersalah atas insiden itu harus diberikan sanksi supaya bekerja lebih profesional. "Mereka tidak boleh menggampangkan dan agar betul-betul cermat dalam setiap pekerjaan. Insiden ini tidak perlu terjadi. Itu, kan, sangat *basic*. Pesawat, kok, bisa tabrakan semacam itu."

Bandara Halim yang kecil, sambung Fadli lagi, memang harus dibatasi operasionalnya. Pesawat komersil yang masuk pun tidak boleh terlalu banyak. Harus disesuaikan dengan kapasitas luas bandarannya. ■

(mh), foto: od/hr



## Agus Hermanto Tak Mau Berandai-andai Menyikapi Masalah Fahri Hamzah

**W**akil Ketua DPR-RI Agus Hermanto tidak mau berandai-andai terkait pelepasan jabatan Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR-RI. Isu ini mencuat setelah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Sohiful Iman membenarkan ada surat pemecatan Fahri dari jenjang keanggotaan partai.

Agus politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, anggota dewan yang duduk di DPR di bawah koordinasi fraksi, maka kewenangan ada di dalam internal fraksi.

"Kami hadir di DPR-RI ini kan mewakili dari fraksi-fraksi sehingga yang memiliki kewenangan penuh adalah fraksi dari partai itu sendiri. Kami tidak mau berandai-andai, sampai saat ini suratnya pun kami belum menerima," ungkap Agus saat diwawancarai, di Jakarta, Senin (4/4/2016).

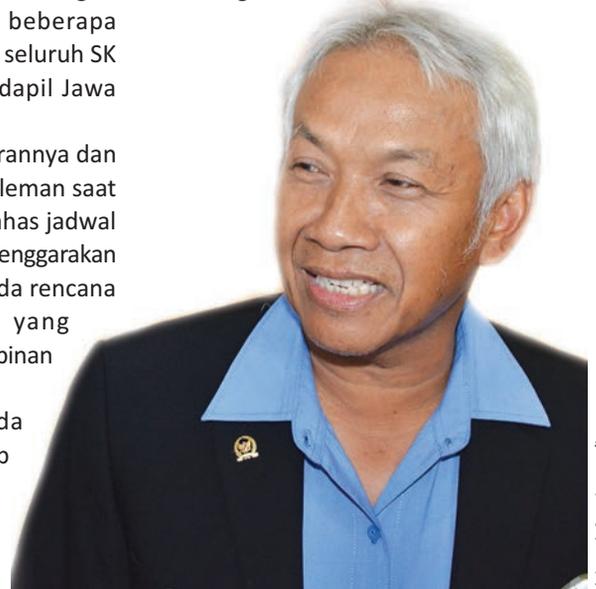
Menurutnya, meskipun di beberapa

media *online* sudah beredar surat pemecatannya, namun hal tersebut tidak menjabarkan secara jelas. "Memang di *online* hanya ada fotocopy beberapa lembar, disana tidak mewakili seluruh SK yang ada," ujar dewan dari dapil Jawa Tengah I.

Agus mengatakan, kehadirannya dan Pimpinan DPR di kompleks parlemen saat ini, sebenarnya untuk membahas jadwal rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada Rabu (6/4), dan belum ada rencana membahas permasalahan yang menimpa salah satu unsur pimpinan DPR Fahri Hamzah.

kita akan membahas agenda rapat paripurna, karena setiap kegiatan didahului dengan rapat pimpinan. Kemudian rapat Bamus, baru rapat paripurna rencananya nanti hari Rabu kita akan rapat

paripurna pembukaan. Sehingga ini untuk memfasilitasi rapat paripurna tersebut," tutur Agus. ■



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

(foto.nt), foto:kresno/hr.

## Fahri Hamzah Beri Penjelasan Terkait Pemecatannya di Partai

**W**akil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah memberikan penjelasan kepada awak media terkait informasi pemecatan dirinya dari jenjang

keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia menyatakan, dalam proses pemecatan dirinya di Majelis Takhim PKS, ada banyak kejanggalan yang dirasakannya.

Dewan dari dapil Nusa Tenggara Barat ini berargumen, partai ada dalam wilayah hukum negara, sehingga jika ada masalah partai yang memiliki dampak kepada masyarakat luas bisa dilakukan proses aduan hukum selanjutnya. "Saya sebagai warga negara akan membawa masalah ini ke ranah hukum," ujar Fahri di Jakarta, Senin, (4/4/2016)

Dia juga mengatakan, jabatan di lembaga legislatif yang dia emban saat ini merupakan jabatan publik, terpilih karena kehendak rakyat. Bahkan Fahri terpilih di dapilnya dengan suara terbanyak. "Jabatan yang saya pegang

adalah jabatan publik, dari negara, dipilih oleh paripurna. Saya dipilih menjadi anggota dewan dengan suara tertinggi," tegas Fahri.

Fahri juga mengungkapkan, bahwa Partai belum memberikan penjelasan secara gamblang kepadanya, mengenai penyebab apa dia dipecat. Menurutnya jika sudah ada penjelasan yang rasional, maka dia akan mudah mengambil tindakan.

"Saya belum mengerti apa yang dituduhkan kepada saya. Kalau saya sudah mantap semua keputusan akan saya ambil," ungkapnya.

Meskipun demikian, Fahri mendambakan PKS menjadi partai yang penuh dengan rasa persaudaraan, tidak ada hirarki yang berlebihan. Dia juga mengatakan akan membangun partai bersama kader-kadernya.

"Saya ingin orang mengenal PKS partai yang penuh dengan persaudaraan, tidak ada hirarki. Saya bersama kader akan membangun partai ini," harapnya ■



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

(foto.nt) foto:kresno/hr.



## Pemuda Adalah Aktor Sejarah Penting

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah menegaskan, pemuda merupakan aktor sejarah yang penting bagi perjalanan suatu bangsa, khususnya Bangsa Indonesia. Untuk itu, pemuda jangan sampai melupakan sejarah perjalanan bangsa, agar memiliki perspektif untuk masa depan.

Demikian ditegaskannya usai membawakan orasi dalam acara Mimbar Kebangsaan, yang bertemakan Pemuda dan Bangsa yang Besar, di Aula KPA, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (5/4). Hadir dalam acara ini juga, Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, Ahmad Taqwa.

"Jika saya diundang oleh mahasiswa dan organisasi kepemudaan, maka kita mengangkat tema tentang sejarah, karena sejarah itu penting untuk mereka. Setiap anak muda itu harus mempunyai perspektif tentang masa depan, tapi di satu sisi juga harus punya refleksi masa lalu. Karena mereka berada di usia pertengahan," kata Fahri.

Politisi F-PKS itu menambahkan, dalam diri pemuda juga harus ditanamkan, akan dibawa kemana perjalanan hidupnya. Sehingga, ketika para pemuda sudah mengetahui sejarah dan perspektif masa depan, maka lengkaplah narasi pengetahuan mereka.

"Sehingga mereka tahu, darimana mereka datang, dan akan kemana mereka pergi," imbuhnya.

Fahri menemukan sebuah persepsi, ketika pemuda belum percaya diri untuk tampil, hal itu diakibatkan kurangnya frekuensi membaca. Ia menilai, dalam usia muda mereka, tidak perlu khawatir jika berbuat salah, karena mereka berada pada usia sedang belajar.

"Karena itu, kepercayaan diri mereka harus muncul, sehingga mereka dapat tampil menjadi pemimpin pada saat ini, atau persiapan diri untuk menjadi pemimpin di masa mendatang," pesan politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu.

Untuk menjadi pemimpin, Fahri

mengingatkan kepada generasi muda untuk sering berlatih. Ia juga merasa bangga, karena ia telah menjadi bagian dari persiapan bagi generasi muda saat ini, untuk menghadapi masa depan.

"Yang kita lakukan hari adalah sebagai sarana latihan, dan mereka sedang berada dalam proses latihan. Kita senang menjadi bagian dari persiapan mereka. Harus terus dipersiapkan, supaya mereka tetap punya kesadaran bahwa mereka bagian dari kita. Namun karena mereka memang belum waktunya," ujar Fahri.

Dalam kesempatan ini, Fahri juga menceritakan berbagai kisah heroik peran pemuda di masa terdahulu.

Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, Trisman Saputra mengatakan, Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar dan cerdas, tapi membutuhkan pemuda yang peduli dan mau memperbaiki Tanah Air.

"Tidak hanya dibutuhkan kemampuan, kepedaiaan, juara, tapi orang-orang yang bisa mengelola kekayaan Bangsa Indonesia, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," kata Trisman

Ia berharap, Fahri dapat memberikan sedikit curahan hati, pengalaman dari aktivis mahasiswa, hingga sekarang menjadi anggota Dewan. Ia juga berharap, banyak pengalaman yang dapat mencerahkan para mahasiswa, baik pengalaman manis atau kurang baik.

"Kami membutuhkan nasihat, sehingga kami bukan hanya bisa menerima kebaikan negeri, tapi kami bisa membalas kebaikan negeri ini. Kedepannya kami para mahasiswa dapat mengantisipasi dan menjalankan roda pemerintahan negeri ini," harap Trisman.

Sementara Ketua Pelaksana Acara, Denny Trisna Jaya berharap, mudah-

mudahan acara ini dapat menjadi ajang belajar bagi seluruh peserta, sehingga nantinya generasi muda menjadi manusia yang baik.

Selama di Palembang, Fahri juga membawakan orasi kebangsaan dalam acara Milad KAMMI ke 18 dan Temu Tokoh Nasional di Auditorium Graha Bina Praja Sumatera Selatan. Dalam acara bertema Mencari Pahlawan Muda, Menyongsong Kejayaan Indonesia 2045 itu, hadir juga Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ishak Mekki. ■



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

**J**umlah lulusan dari fakultas kedokteran di Indonesia begitu melimpah setiap tahun. Persoalannya selalu distribusi dokter yang tidak merata untuk memberi layanan kesehatan kepada masyarakat pedesaan. Daerah perkotaan masih menjadi daya tarik para dokter untuk berpraktik. Ini sudah menjadi persoalan klasik. Ironis, ketika jumlah dokter melimpah, tapi daerah pedesaan kekurangan dokter.

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwati Hata mengomentari fenomena distribusi tenaga dokter yang tidak merata ini. Ditemui sebelum



## Ade Komarudin Resmikan Media Center DPR-RI

**K**etua DPR RI Ade Komarudin melakukan penandatanganan prasasti dan penggungtingan pita dalam acara peresmian Media Center, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (05/4).

"Dengan mengucapkan *Bismillahirohmanirohim*, maka ruangan Media Center Dewan Perwakilan Rakyat dengan resmi kita buka," ucap Ade Komarudin.

Dalam sambutannya Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, menyatakan rasa terima kasih kepada Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan seluruh pejabat dilingkungan Kesetjengan, yang telah bekerja keras menuntaskan renovasi ruangan Media Center tersebut.

"Mudah-mudahan dapat memberikan kenyamanan untuk para wartawan di DPR, sebab kalau saya masuk ke dalam ruangan ini, saya secara pribadi merasa nyaman," ujar Akom.

Didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Anggota DPR Muhamad Misbakhun serta pejabat Setjen DPR, Ketua Dewan menyatakan dirinya merasa tidak tega



Suasana Peresmian Media Center DPR RI

melihat para awak media yang terkadang sering terlihat duduk dilantai, saat sedang menunggu narasumber atau sedang mengerjakan berita. Belum lagi masalah sampah makanan dan botol air mineral yang tercecer di Gedung Nusantara lobi.

Dengan ruangan baru direnovasi ini, Akom berharap para wartawan parlemen dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. " Dengan ruangan yang bersih dan nyaman, maka akan menghasilkan karya yang baik pula. Dengan peresmian media center ini diharapkan tidak ada lagi teman-teman wartawan yang nongkrong di luar," tandasnya.

Ruang Media Center disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan para wartawan yang bertugas menyampaikan informasi dan berita yang terkait dengan aktifitas anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya.

Media Center ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kerja bagi awak media, seperti CCTV yang dapat melihat siapa saja tamu yang datang ke Gedung Dewan, pendingin ruangan, ruang diskusi, serta ruang area untuk merokok.

"Kopi juga akan tersedia nantinya, kalau kurang nanti bisa dikordinasikan dengan Ibu Sekjen. Dengan demikian tidak ada fasilitas lain diluar fasilitas ini. Tempat ini disiapkan secara nyaman untuk bekerja kita dengan maksimal," tambah Politisi F-Golkar itu.

Acara peresmian ini ditandai penggungtingan pita dan pemotongan nasi tumpeng. Potongan pertama diserahkan Ketua DPR kepada Sekjen DPR Winantuningtyastiti, dan potongan yang kedua diberikan kepada Koordinator Wartawan Dewan, serta potongan ketiga diserahkan kepada wartawan senior. Fadli Zon juga melakukan pemotongan tumpeng diserahkan kepada mantan pengurus Koordinatoriat wartawan parlemen ■

(feko,mp), foto:kresno/hr.

## Perkotaan Masih Jadi Pilihan Utama Para Dokter

mengikuti Rapat Paripurna DPR, Rabu (6/4), Ichi-sapaan akrab politisi Partai Golkar ini- mengatakan, wilayah perkotaan masih tetap menjadi pilihan para dokter. Di kota, para dokter bisa lebih mengembangkan profesinya, selain juga mendapat materi yang cukup banyak.

"Praktik di kota bagi dokter lebih menyenangkan. Selain pasiennya banyak, juga mendatangkan materi yang cukup. Hal ini diakui oleh banyak dokter dari teman-teman saya," aku Ichi. Fenomena

ketimpangan seperti ini, sambungnya, belum teratasi oleh Pemerintah hingga sekarang.

Seperti diketahui, Pemerintah sendiri menargetkan rasio yang ideal untuk pemerataan tenaga dokter. Rasionya adalah 1:2500, atau 1 dokter untuk 2500 orang. Di luar negeri rasionya 1:1000. Bahkan, pemerintah juga merilis rasio terbaru, yaitu 41:100.000. Dengan asumsi penduduk Indonesia sekitar 255,4 juta jiwa, maka Indonesia



Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwati Hatta

membutuhkan 104.739 tenaga dokter. Menurut Ichi, rasio 41:100.000 belum ideal. Mungkin yang lebih ideal sekitar 30:100.000. ■

(mh), foto:arief/lw.



## Peraturan Kementerian KP Tak Sependirian dengan Nelayan



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Agus Hermanto menilai, ada beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang nelayan justru tidak sependirian dengan kebutuhan nelayan lokal.

Keluarnya Permen tidak koheren, sehingga meresahkan nelayan antara lain; Permen Nomor 56, 57, 58, serta Permen Nomor 1 dan 2 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah nomor 75. Dalam peraturan tersebut bermaksud menghalangi nelayan asing berlaut di wilayah teritorial nasional, tetapi justru yang terkena imbas malah nelayan lokal.

"Memang maksud hatinya baik, untuk

m e m b e r i k a n halangan kepada kapal-kapal asing, nelayan-nelayan asing, namun ternyata ilmunya belum sampai ke situ, yang kena malah masyarakat kita sendiri, bahkan masyarakat kecil," keluh Agus setelah menerima aspirasi

dari Paguyuban Nelayan Jawa Tengah, Kamis (7/4).

Dalam audiensi kali ini juga diungkap ada satu Permen yang mengharuskan nelayan membayar pajak di muka selama satu tahun. "Akhirnya dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan, bayarnya setahun di depan padahal yang digunakan hanya enam bulan," sambat Agus.

Politisi Partai Demokrat ini menghimbau Menteri Susi Pudjiastuti, untuk memperbaiki masalah Permen yang tidak sependirian dengan nelayan lokal.

"Kami juga menghimbau Bu Menteri sesuai dengan rapat kerja yang dilaksanakan di Komisi IV, sanggup untuk mengevaluasi masalah Permen, bahkan nanti bisa mengajukan ke Pak Jokowi masalah PP-nya yang sangat merusak

perekonomian kita khususnya di bidang perikanan," seru Agus.

Pimpinan Dewan dari Dapil Jawa Tengah I ini mengatakan apabila permen tersebut tidak ditinjau ulang maka akan berdampak banyak orang yang kehilangan pekerjaan. "PHK barangkali jutaan orang di seluruh Indonesia. Dan ini akan lebih memperburuk perekonomian Indonesia," ujar Agus.

Koordinator Paguyuban Nelayan Jawa Tengah, Didik Murdiono yang hadir dengan membawa 10 orang perwakilan dari pelaku usaha perikanan mengungkapkan keresahan hatinya, karena Permen Kementerian KKP telah menaikkan pajak sebesar 400 persen, dan menjadikan banyak kapal yang mangkrak tidak melaut, sehingga mereka kehilangan penghasilan.

"Resah sekali, kapal menganggur sampai sekarang. Kita sebagai nahkoda di lapangan susah, banyak kapal yang mangkrak, bahkan harus bayar pajak yang mahal, kenaikan sampai 400 persen," rintih Didik.

Dalam audiensi ini para nelayan didampingi Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto, serta dihadiri juga Anggota Komisi IV Vivi Sumantri Jayabaya, sebagai Komisi yang membidangi urusan nelayan. "Karena saya sebagai Anggota Komisi IV sudah semestinya menyerap aspirasi dari bapak-bapak nelayan tadi, minggu depan akan raker dengan Menteri Kelautan, dan Perikanan" ujar Vivi ■

(eko,mpj), foto : kresno/hr

## Ketua DPR Minta Maaf mengenai Pernyataannya

**K**etua DPR Ade Komarudin, meminta maaf terkait pernyataannya yang mengatakan, 'anggota DPR berpikir sesat'.

Sebelumnya, Kang Akom sapaan Ade Komarudin mengatakan mengenai pembangunan perpustakaan bisa membuat anggota Dewan yang selama ini berpikir sesat bisa menjadi lurus. Ia meminta maaf setelah Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV mempertanyakan hal tersebut saat Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (06/4).

"Pertama, mohon maaf kepada Mas Edhy, saya mohon maaf bila ada kata-kata, komentar yang kurang berkenan. Tidak ada maksud dari saya untuk rendahkan martabat, justru kami ingin parlemen lebih bermartabat,"ujarnya usai membacakan pidato.

Sebelumnya, beredar video di *Youtube* yang menampilkan Akom berkata tidak enak terhadap anggota DPR. Dalam video berdurasi 15 detik itu diunggah melalui akun "Wakil Rakyat" yang sudah disaksikan 78 pemirsa *Youtube*. ■



Ketua DPR RI Ade Komarudin



## Papua Barat Miliki Potensi Besar, Tapi Kemiskinannya Tinggi

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sangat luar biasa, baik pertanian, perikanan, pertambangan, hasil hutan, maupun pariwisata. Semua sektor ini bisa menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.

Namun potensi luar biasa tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat. "Papua Barat memiliki sumber daya yang luar biasa, akan tetapi kondisi perekonomian masyarakatnya masih memprihatinkan," nilai Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani kepada Parlemen di sela-sela kunjungan kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, baru-baru ini.

Menurutnya, perekonomian Papua Barat umumnya digerakkan melalui perhubungan laut dan udara. Untuk itu keberadaan dan kelancaran arus transportasi laut dan udara sangat penting bagi perkembangan perekonomian di wilayah ini. Pengembangan transportasi baik darat maupun laut sangatlah penting untuk mengurangi kesenjangan aksesibilitas

*Anggota Komisi VI Endang Srikarti*



*Tim Kunker Komisi VI menyanyikan Indonesia Raya bersama anak-anak Papua*

dan meningkatkan integrasi wilayah.

Pengembangan potensi wilayah ini tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Papua Barat membutuhkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Provinsi Papua Barat ini akan mampu menarik investor apabila memiliki daya tarik investasi. Tidak cukup hanya dengan modal kekayaan sumber daya alam, aksesibilitas juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, jelasnya.

"Untuk itu, kami sangat mendorong peran serta pihak BUMN jasa transportasi darat, laut, maupun udara untuk

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya dengan cara membangun pelabuhan dan bandara atau dengan mengembangkan atau memperbaiki apa yang sudah ada saat ini," papar Anggota F-PG itu.

Ia berharap pihak Pemda, BUMN, serta swasta dapat menjalin kerja sama dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia umumnya dan Provinsi Papua Barat khususnya.

Senada dengan Endang, Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, juga mengatakan, kemiskinan di Papua Barat nomor tiga terbesar setelah Papua dan Maluku.

"Kita berkeliling salah satu tujuannya adalah untuk melihat dan meninjau secara langsung bagaimana sebaiknya proses pembangunan ekonomi di Papua Barat itu bisa langsung mengenai ekonomi sasarannya. Raja Ampat salah satu pemandangan alam sepuluh terbaik dunia. Ini harus kita manfaatkan untuk menambah devisa negara dan menunjang pendapatan asli daerah," ungkapnya. ■

(i/w), Foto: iwan/iw

## Kedepankan Layanan Prima Bagi Calon Jamaah Haji

DPR meminta kepada Pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, untuk tetap mengedepankan pelayanan yang prima bagi calon jamaah haji.

"Harapan kita bersama agar penetapan BPIH dapat dilakukan lebih awal waktunya dan lebih murah biayanya, dengan tetap mengedepankan pelayanan yang prima," ucap Ade Komarudin dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (06/4).

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi VIII, bersama dengan Pemerintah akan segera menyelesaikan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2016.

Selain masalah tersebut, Rapat Paripurna DPR juga membahas tentang Calon Ketua Anggota Komite BPH Migas dan Calon Kantor Akuntan Publik.

"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR juga akan membahas dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Ketua dan Anggota



*Suasana Rapat Paripurna DPR*

Komite BPH Migas dan Calon Kantor Akuntan Publik (KAP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK RI Tahun Anggaran 2015," jelas Akom, panggilan akrab orang nomor 1 di DPR itu. ■

(dep/mp) Foto: Tim Parle/hr



## Kekurangan Tenaga Medis Masih Jadi Tantangan Indonesia

**K**ementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan izin dibukanya Program Studi Kedokteran atau Fakultas Kedokteran (FK) di delapan perguruan tinggi negeri dan swasta tahun ini. Perguruan tinggi diminta komitmennya untuk mengedepankan mutu agar menghasilkan dokter yang profesional dan berkualitas.

Namun di satu sisi, pembukaan delapan FK beberapa waktu lalu itu mendapat tentangan dari beberapa pihak. Mengingat pada akhir tahun lalu, Menristekdikti Muhammad Nasir mengeluarkan moratorium pembentukan FK baru. Pasalnya, kualitas FK di Perguruan Tinggi baru dinilai masih rendah.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menilai, kekurangan tenaga medis berkualitas, masih menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Apalagi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini.

"Dibukanya Fakultas Kedokteran di beberapa Perguruan Tinggi selain mempertimbangkan peningkatan akses masyarakat untuk bisa masuk FK, tentunya yg paling penting adalah pemenuhan standar mutu, baik sarana prasarana fakultas kedokteran, standar mahasiswa, dosen, dan lainnya," kata Dadang, dalam pesan pendek yang diterima Parlemen, Selasa (5/4).

Politisi F-Hanura itu menambahkan, dikeluarkannya moratorium pembentukan FK itu semula untuk menjaga kualitas atau pemenuhan standar mutu, sehingga PTN atau PTS tidak asal membuka prodi kedokteran.

"Sehingga kalau kemudian Menristekdikti mencabut moratorium tersebut dan membuka FK baru, harus ada jaminan bahwa itu dilakukan dengan selektif dan terukur. Kalau tidak, maka

menteri tidak konsisten terhadap kebijakan moratorium itu," pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Pembukaan FK baru ini pun mendapat penolakan dari beberapa organisasi dan asosiasi pendidikan kedokteran, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI).

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Prof dr Dr Bambang Supriatno, SpA(K), mengatakan keputusan Kemenristekdikti untuk membuka 8 FK baru patut dipertanyakan. Sebabnya, rekomendasi yang disetujui oleh tim independen evaluasi hanya 3 fakultas.

Alasan utama penolakan adalah perlindungan kepada masyarakat. Saat ini, 75 fakultas kedokteran yang ada Indonesia masih memiliki variasi akreditasi dan tingkat kelulusan yang tinggi. Hanya 21 persen saja yang menyandang akreditasi A, sisanya 43 persen menyandang akreditasi B dan 36 persen C.

"Daripada membuka fakultas kedokteran baru, lebih baik yang ada ini

ditingkatkan mutunya. Dengan begitu kualitas dokter yang lulus akan meningkat. Kalau dibuka banyak-banyak tapi kualitas rendah, masyarakat yang akan kena dampaknya," tegas Prof Bambang lagi.

Sebagaimana diketahui, bulan lalu Kemenristekdikti memberikan izin pendirian prodi kedokteran kepada delapan Perguruan Tinggi, yakni Universitas Khairun Ternate, Universitas Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alauddin Makassar, Universitas Bosowa Makassar, dan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Menristekdikti mengatakan, saat ini mutu sejumlah fakultas kedokteran masih ada yang rendah. Ini tecermin dari hasil akreditasi dan kelulusan mahasiswa dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPD).

"Kami (Kemenristekdikti) ingin menata dulu FK yang sudah ada yang kualitasnya masih kurang. Kita ingin lihat FK di PT baru supaya stabil dulu," alasan Menristekdikti ketika ditanya terkait moratorium FK, akhir tahun lalu ■

(sf), Foto: Achsa/In

**K**etua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan rasa duka dan prihatin, terkait situasi internasional yang terjadi di beberapa belahan negara dunia belum lama ini berupa serangan bom oleh kelompok-kelompok radikal.

"DPR mengutuk keras atas serangan bom bunuh diri yang terjadi di Brussels, Belgia, yang menewaskan 35 orang dan 200 orang luka-luka, yang diantaranya ada warga negara Indonesia. Demikian juga dengan serangan bom di Lahore, Pakistan, yang menewaskan 69 orang serta melukai 193 orang lainnya," tandas Ade Komarudin di depan Sidang Paripurna Dewan, Rabu (06/4).

Dalam peran diplomasi parlemen,



## DPR Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Papua Barat

**K**etua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mendorong agar pembangunan infrastruktur di Papua Barat untuk dipercepat. Hal itu disampaikan kepada Parlemen usai melakukan Kunjungan Kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, belum lama ini.

"Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian dampak dari konektivitas dan minimnya infrastruktur yang selama ini memicu disparitas harga-harga barang konsumsi dan non konsumsi dapat diminimalisir," ujar politisi Fraksi PAN itu.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan jalan, karena saat ini tujuan pembangunan jalan adalah untuk percepatan pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah, sehingga dengan begitu dapat mendekatkan sentra-sentra produksi dengan kawasan industri yang berpola hilirisasi seperti yang sedang



Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR berfoto dengan Masyarakat Papua

dikembangkan di Teluk Bintuni saat ini.

Hafisz juga menilai bahwa jalan penghubung di Papua Barat masih belum memadai dan belum layak, sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. "Prasarana jalan yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten dan antar Ibukota Kabupaten belum memadai. Hal ini dikarenakan letak geografis kota-kota/desa-desa yang berkembang berada di pesisir laut yang dikelilingi oleh hutan-hutan, rawa-rawa, sungai-sungai serta pegunungan yang sulit ditembus oleh kendaraan bermotor biasa," jelasnya.

Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I ini juga menyebutkan bahwa infrastruktur di Papua Barat ini sangat kecil sekali dan faktor ini yang menghambat pembangunan. "Orang mau investasi takut, orang mau membuka kawasan tidak ada listrik dan tidak ada jalan," sambungnya,

Padahal sebagaimana diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp 10 Triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua, dari jumlah itu sebesar Rp 6 Triliun dialokasikan untuk Provinsi Papua dan Rp 4 Triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Sementara, dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 955 Miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 759 Miliar diperuntukkan untuk pembangunan jalan.

Tidak hanya jalan, pembangunan sarana dan prasarana lain yang akan memberikan multiplier efek pada perekonomian Papua Barat juga perlu digiatkan. "Untuk itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kementerian terkait, Pemda, BUMN dan pihak Swasta," pungkasnya. ■

(w), foto: iwan/fw

## DPR Kutuk Keras Serangan Bom Brussels dan Lahore



Ketua DPR Ade Komarudin

pada Masa Persidangan IV, DPR akan mengirim delegasinya untuk menghadiri pertemuan dan konferensi organisasi parlemen regional, diantaranya Asia E u r o p e

Parliamentary Partnership (ASEP) 9 Meeting, yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 2016 di Ulaanbaatar, Mongolia.

"Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan agenda parlemen negara-negara Asia dan Eropa dengan agenda pemerintah yang tergabung dalam ASEP, yang tahun ini memperingati 20 tahun pembentukannya," ujarnya.

Pertemuan ini juga akan menghasilkan Declaration of the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting, yang diharapkan akan semakin mempererat kerja sama antara negara-negara Asia dan

Eropa di masa depan.

Selain itu juga ada Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs Meeting di Teheran, Iran. Ada pula Assembly Inter-Parliamentary Union (IPU) di Lusaka, Zambia.

"Posisi DPR sebagai Global Paliamentarians Against Corruption (GOPAC) akan meluncurkan national chapter Indonesia, oleh karenanya kepada anggota Dewan yang ingin bersama-sama menggalang kekuatan gerakan anti korupsi, agar dapat segera bergabung," papar politisi F-Golkar tersebut. ■

(dep.mp) Foto: Tim Parle/fh



## Komisi X Akan Pertanyakan Pembukaan FK Baru oleh Kemenristekdikti

**W**akil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) akan mempertanyakan pemberian izin dibukanya Program Studi Kedokteran atau Fakultas Kedokteran (FK) di delapan perguruan tinggi negeri dan swasta tahun ini oleh



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasalnya, pembukaan delapan FK beberapa waktu lalu itu mendapat tentangan dari beberapa pihak. Mengingat pada akhir tahun lalu, Menristekdikti Muhammad Nasir mengeluarkan moratorium pembentukan FK baru. Pasalnya, kualitas FK di perguruan tinggi baru dinilai masih rendah.

"Kami akan mempertanyakan hal ini kepada Menristekdikti, kira-kira pekan depan. Kami ingin tahu laporan Menristekdikti," kata Kharis, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra). Ia mengaku, sudah mengetahui soal pemberian izin kepada delapan FK baru itu.

"Kita akan pertanyakan kepada Menristekdikti pada raker mendatang," ujar politisi asal dapil Lampung itu.

Sebagaimana diketahui, bulan lalu Kemenristekdikti memberikan izin pendirian prodi kedokteran kepada delapan Perguruan Tinggi, yakni Universitas Khairun Ternate, Universitas Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alauddin Makassar, Universitas Bosowa Makassar, dan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Menristekdikti mengatakan, saat ini mutu sejumlah fakultas kedokteran masih ada yang rendah. Ini tecermin dari hasil akreditasi dan kelulusan mahasiswa dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

"Kami (Kemenristekdikti) ingin menata dulu FK yang sudah ada yang kualitasnya masih kurang. Kita ingin lihat FK di PT baru supaya stabil dulu," alasan Menristekdikti ketika ditanya terkait moratorium FK, akhir tahun lalu. ■

(sf), Foto: Azka/hr

## Irtama Akan Libatkan KPK dan Kejagung dalam Pendampingan Proyek DPR

**J**ajaran Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR-RI yang dikoordinatori oleh Setyanta Nugraha merencanakan untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam pendampingan proyek yang ada di lingkungan DPR.

"Iya betul. Jadi dalam beberapa proyek mengikutsertakan pendampingan dengan KPK bahkan Kejaksaan Agung," tandas Setyanta saat diwawancarai usai melakukan studi banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta,

Rabu (6/4).

Menurut Toto, begitu Setyanta biasa disapa, rencana tersebut guna pelaksanaan proyek tidak terjadi pelanggaran hukum. Dengan begitu para pelaksana proyek di DPR tidak perlu was-was karena KPK dan Kejaksaan bisa saja memberi bimbingan agar semua sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Itu adalah untuk meyakinkan pelaksanaan proyek sesuai dengan koridor hukum. Sehingga ada rasa percaya diri pada pelaksanaan pekerjaan. Nanti mereka dikawal. Kita juga berharap

kegiatan-kegiatan di Sekretariat Jenderal DPR nantinya itu melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung," sergah Toto.

Toto mengungkapkan, rencana tersebut untuk mengikuti jejak dari Irjen Kementerian PUPR yang melakukan MoU dengan KPK, serta berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan.

"Kami ingin menggali pengalaman dari apa yang telah dilakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Kita tahu bahwa dari kapabilitas Kementerian PU dari 2012 sudah pada level dua, sementara kami baru level satu," jelas Toto.

Irjen Kementerian PUPR, Ridlo Ananda Anwar menjelaskan tentang kegiatan yang menjadi prioritasnya di tahun 2016. MoU dengan KPK tentang koordinasi dan kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Pelaksanaan zona integritas pada



## BUMN Energi Diminta Jamin Energi Listrik dan BBM di Yogya

**K**omisi VI DPR RI mengharapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Energi berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dengan meningkatkan pelayanan, penjaminan stok energi listrik maupun BBM.

Wakil Ketua Komisi VI Dodi Alex Noerdin mengatakan BUMN Energi harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan secara adil dan merata energi listrik maupun BBM. Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), secara konsisten dan berkesinambungan.

"Energi berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan meningkatkan pelayanan, penjaminan stok energi baik itu listrik maupun BBM,"katanya saat memimpin Tim Komisi VI mengadakan pertemuan dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT. Pertamina perwakilan Yogyakarta, beberapa waktu lalu.



Wakil Ketua Komisi VI Dodi Alex Noerdin

Menurut Dodi, kebutuhan energi Indonesia akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya wilayah hunian dan industri di Indonesia. Dengan konsumsi listrik di Indonesia yang begitu besar, maka bahan bakar yang dibutuhkan akan ikut bertambah. Sementara itu, sebagian besar pembangkit yang digunakan di Indonesia merupakan pembangkit yang bahan bakarnya tidak dapat diperbaharui.

"Dalam menanggulangi masalah ini, pemadaman listrik secara bergilir untuk penghematan daya menjadi solusi efektif yang diberikan oleh pemerintah. Namun solusi ini dipandang kurang tepat karena bersifat merugikan konsumen terutama pada industri rumah tangga dan hunian. Di sinilah kemudian muncul kesadaran akan peran dari energi baru dan terbarukan," tandasnya.

Provinsi DI Yogyakarta telah melaksanakan pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) oleh PT. UPC Yogyakarta Bayu Energi di Pesisir Selatan Kabupaten Bantul. Proyek PLTB ini akan menghasilkan kapasitas terpasang sebesar 50 Mega Watt (MW). Dengan estimasi 1 MW pembangkitan listrik dapat memenuhi kebutuhan listrik 1.000 rumah (rata-rata 1.000 watt/rumah) total PLTB ini akan membangkitkan listrik bagi 50.000 rumah.

"Selain bermanfaat sebagai pemasok kebutuhan

listrik bagi masyarakat, pembangunan PLTB ini akan memicu berbagai hal seperti menjadi pusat pengembangan ekonomi baru, menambah tata guna lahan yang akan memberikan manfaat bagi pengguna lahan saat ini, menjadi tujuan wisata yang unik yang akan menjadikan Kabupaten Bantul dan DIY sebagai pusat eco-pariwisata dan pusat pendidikan energi bersih dan terbarukan di Indonesia," paparnya.

Pemanfaatan energi baru terbarukan ini menjadi penting mengingat bahwa hingga akhir 2015, sebanyak 238 dari total 5000-an dusun di DI Yogyakarta belum dapat menikmati aliran listrik. Rasio elektrifikasi di DI Yogyakarta per Juni 2015 yakni 86,28. Rasio ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014 sebesar 82,62 dan tahun 2013 sebesar 80,55.

Terkait pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), PT Pertamina (Persero) telah memasarkan Peralite di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berimbas pada penurunan konsumsi BBM Premium. "Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saat ini di wilayah Jawa Tengah dan DIY sudah ada kurang lebih 170 SPBU yang menyediakan Peralite. Jumlah ini masih akan terus meningkat,"paparnya. ■

(es), foto : agung/hr



Inspektoral Utama Setyanta Nugraha menerima cenderamata

unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian PUPR," papar Ridlo.

Ridlo juga menjelaskan tentang koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam rangka percepatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) ■

(eko,mp), foto : kresno/hr



## Irtama DPR Adopsi Sistem Lelang dan Audit

Jajaran Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR-RI, melakukan studi banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam lawatannya ini Irtama bermaksud mengadopsi sistem pengawasan lelang proyek dan audit.

"Lelang Pradipa yang dilakukan PU ini bisa kita adopsi. Di PU sudah melaksanakan Lelang Pradipa yang dikawal oleh inspektorat jenderal," ujar Irtama DPR, Setyanta Nugraha di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/4).

Setyanta yang akrab disapa Toto menjelaskan Lelang Pradipa diterapkan sesuai amanat dari presiden, dan sudah berjalan selama dua tahun. Dia melanjutkan Lelang ini berkaitan dengan kinerja penyerapan anggaran, yang selama ini selalu menumpuk pada akhir tahun masa anggaran. Toto menilai, hal tersebut berdampak pada pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

"Ini terkait dengan kinerja penyerapan anggaran yang fenomenanya adalah menumpuk di akhir tahun anggaran," ungkap Toto.

Berkaitan dengan sistem audit dan pengawasan PUPR, Toto akan mengadopsi cara pendampingan saat berjalannya proses pekerjaan di lembaga serta audit kinerja dan anggaran. Pembagian kerjanya, audit 60 persen dan 40 persen sisanya adalah pendampingan pengerjaan.

"Ini yang akan kita adopsi sistem pendampingan yang dilakukan PU terhadap audit, sehingga kinerja organisasi institusi itulah yang diutamakan," jelas Toto.

Dia juga menjelaskan, kerja Irtama mengarah pada keberhasilan institusi. Oleh karena itu dengan pendampingan kepada auditee sebagai rekan kerja serta melakukan pengawalan terhadap hal-hal yang dilakukan auditee.

"Sehingga bisa mendeteksi secara dini potensi adanya penyimpangan," paparnya.

Sementara itu Irjen Kementerian PUPR Ridlo Ananda Anwar beserta jajarannya menyambut Irtama

DPR dengan tangan terbuka, dan telah memberikan pengalaman-pengalamannya kerja dengan cukup jelas. "Terimakasih atas kehadirannya, sharing ini untuk saling berbagi pengetahuan informasi dan pengalaman," ujarnya menyambut jajaran Irtama DPR. ■

(eko, nt) foto: kresno/hr



Inspektorat Utama Setyanta Nugraha

## Legislator Pantau Pelaksanaan UNBK

Ujian Nasional (UN) Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, mulai berlangsung Senin (4/4). Pelaksanaan UN dengan kertas, ataupun Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMA, akan dilaksanakan dari Senin hingga Rabu (6/4). Sementara khusus untuk SMK, UN digelar hingga Kamis (7/4).

Untuk mengetahui persiapan dan pelaksanaan UN di hari pertama, Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi meninjau langsung ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Sekolah

yang berada di daerah pemilihan Ria itu melaksanakan Ujian Nasional UNBK di hari pertama.

"Kunjungan ini untuk memastikan bahwa sekolah yang menggunakan UNBK melaksanakan ujian dengan lancar," kata Ria, dalam rilisnya yang dikirim ke Parlemen, Senin (4/4).

Dalam kunjungan itu, Ria memantau UNBK melalui layar LCD yang sudah disediakan sekolah di ruang kepala sekolah SMA N 9 Bandar Lampung.

Usai pemantauan, politisi F-Gerindra itu menuturkan, ada beberapa hal yang dibahas bersama Kepala Sekolah SMA N

9 Bandar Lampung, Hendro Suyono.

Pembahasan itu meliputi kesiapan peserta dalam menghadapi UN, kesiapan sekolah dalam UN, waktu melaksanakan UN, mata pelajaran yang diujikan serta perbandingan UN tahun ini dan tahun sebelumnya.

"Kami tidak hanya bahas soal UNBK, saya juga menampung aspirasi SMA N 9 Bandar Lampung terkait rencana strategis mereka untuk menjadi sekolah bertaraf internasional," ujar Ria.

Terkait rencana itu, Ria mengaku sangat mendukung rencana tersebut. Mengingat, di era globalisasi ini,



## Press Gathering Dukung Penguatan DPR

**A** Sekjen DPR Winantuningtyas Titi mengharapkan acara *press gathering* dapat mendukung penguatan lembaga DPR. Selain itu, wartawan bisa menjadi mitra untuk mengabarkan situasi secara faktual terkait kegiatan kedewanan.

"Saya berharap wartawan bisa menjadi mitra untuk mengabarkan situasi secara faktual, apalagi saat ini Ketua DPR Ade Komarudin juga berupaya mengejar target UU sesuai yang ditetapkan," ujarnya saat memberi sambutan pada acara *Press Gathering* dengan wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan DPR, Jumat (1/4) malam di Bogor.

Menurut Win, sapaan akrab Sekjen DPR, acara ini digelar guna membangun sinergi untuk mensosialisasikan kebijakan DPR. Hal ini penting karena pers adalah pilar demokrasi sehingga penting bagi DPR untuk mendekatkan diri dengan wartawan.

Acara yang bertajuk "Sinergi DPR dan Wartawan Dalam Mensosialisasikan Kebijakan DPR" ini diselenggarakan di The Sahira Hotel, Bogor, hadir Ketua DPR, Deputi Persidangan Damayanti beserta jajaran kepala dan staf di Biro Pemberitaan



Suasana Diskusi Press Gathering wartawan koordinatariat DPR

DPR.

Dia juga menyinggung soal struktur baru di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Misalnya, perubahan dari Biro Humas dan Pemberitaan menjadi Biro Pemberitaan Parlemen yang terdiri dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Bagian Radio dan Televisi Parlemen, Bagian Humas dan Bagian Penerbitan. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR.

"Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR, kami menganggap semua

memiliki tugas yang sama yakni untuk mempromosikan pendidikan dan mensosialisasikan program kerja DPR kepada masyarakat," paparnya

Dalam acara yang penuh dengan keakraban dan kebersamaan tersebut, Ketua DPR RI Ade Komarudin berharap wartawan

koordinatariat DPR bisa menjadi lebih tertata baik itu dari segi kerapian dalam melakukan peliputan di lingkungan DPR, hal itu sudah dimulai sejak melakukan renovasi Press Room sehingga bisa terlihat lebih rapi.

"Alhamdulillah renovasi Press Room sudah selesai, jika ada kekurangan-kekurangan mohon untuk dikoordinasikan dengan kesekjenan, semoga temen-temen wartawan bisa bekerja dengan nyaman disini dan selalu sehat dalam bekerja," ujar Akom, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan itu, Akom juga berharap jabatan yang didudukinya saat ini hingga akhir periode tahun 2019 dengan membuat peninggalan di parlemen yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Dirinya juga mengaku, jabatan sebagai Ketua DPR RI adalah cita-citanya yang tertinggi di DPR RI.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, dirinya sudah menjadi anggota DPR RI selama empat periode pada 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan kini 2014-2019. "Saya tidak ingin terus-menerus berada di DPR RI. Setelah menduduki jabatan Ketua DPR RI, selanjutnya saya tidak akan maju lagi sebagai caleg untuk periode berikutnya," jelasnya.

Akom menegaskan, periode 2014-2019 adalah masa terakhir dirinya di DPR RI, sehingga berharap dapat membuat peninggalan di parlemen yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Oleh karenanya, ketika ada usulan dari cendekiawan untuk membangun perpustakaan terbesar di Asia Tenggara di kompleks DPR RI, Akom menilai, sebagai usulan bagus yang perlu direalisasikan.

"Perpustakaan sangat penting sebagai infrastruktur pemikiran dalam mendorong pemikiran anak bangsa untuk terus maju," ujarnya. Bagi Akom, jika DPR memiliki perpustakaan terbesar di Asia Tenggara, maka akan menjadi peninggalan yang fenomenal bagi dirinya dan akan tercatat dalam sejarah Indonesia. ■



Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi

memang dibutuhkan generasi unggul yang siap bersaing.

"Saya sangat apresiasi, karena rencana tersebut untuk menyiapkan generasi unggul di daerah Lampung, agar dapat bersaing secara global. Saya akan sampaikan aspirasi pihak sekolah ke Kemendikbud, semoga bisa direalisasikan pihak Kemendikbud khususnya Dirjen Dikdasmen," harap Ria. ■

(sf), foto : hendra/hr

(hs.mp), foto : eno, oji, jay/hr



## RUU Tax Amnesty dan Revisi UU Terorisme Akan Diselesaikan Masa Persidangan IV

Pada Masa Persidangan IV tahun 2015/2016 DPR akan menyelesaikan penyusunan 13 RUU dan melanjutkan pembahasan 15 RUU yang menjadi prioritas bersama dengan pemerintah.

"RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan diselesaikan pada masa persidangan IV ini," jelas Ketua DPR Ade Komarudin dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan IV, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (06/4).

RUU yang akan dilanjutkan proses harmonisasinya di Baleg adalah RUU tentang Pertembakauan yang merupakan inisiatif dari Anggota DPR dari lintas fraksi, dan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang merupakan inisiatif dari Komisi VIII. Sedangkan RUU yang saat ini menunggu Surat Presiden adalah RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor



Ketua DPR Ade Komarudin berpidato di Rapat Paripurna DPR

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Masih ada 4 RUU Ratifikasi yang sampai saat ini masih dibahas, yakni Ratifikasi Persetujuan mengenai Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, Ratifikasi Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan Pembentukan

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.

Ratifikasi Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan Persetujuan Fasilitas Perdagangan, dan Ratifikasi Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen Ke Enam di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

"Saya dan Pimpinan DPR lainnya menghimbau agar Komisi terkait dan Pemerintah segera menyelesaikan pembahasan ratifikasi tersebut," tegas Akom.

Ia juga mengatakan bahwa DPR dan Pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan RUU yang menjadi prioritas Tahun 2016, tanpa mengabaikan kualitas yang menjadi prioritas dalam pembahasan RUU sesuai dengan harapan Pemerintah. ■

(dep.mp) Foto: Tim Parle/hr

## Norwegia Jadi Patner Indonesia Soal SDGs

Norwegia termasuk negara di Eropa yang paling peduli menjaga lingkungan hidupnya. Negara di kawasan Skandinavia ini juga selalu membantu negara-negara berkembang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena komitmennya itu, Norwegia bisa menjadi patner yang ideal bagi Indonesia untuk menyukseskan *sustainable development goals* (program pembangunan berkelanjutan).

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Hamdani menjelaskan, Norwegia tidak saja

dikenal dengan kelestarian lingkungannya, tapi juga kekayaan maritimnya. "Dubes Norwegia kita undang ke BKSAP untuk menjelaskan program *sustainable development goals* yang sudah dicapai negara tersebut," katanya usai menerima Stig Traavik Dubes Norwegia di DPR, Kamis (7/4).

Dalam penanganan kasus kebakaran hutan, Norwegia mampu mengatasinya dengan baik, bahkan mampu mengolah lahan hutan yang sudah terbakar dengan memberi nilai ekonomis tinggi. Banyak yang harus dipelajari oleh delegasi BKSAP sebelum bertolak ke Norwegia pada akhir

April ini. BKSAP DPR rencananya akan bertemu dengan beberapa *stake holder* di Norwegia, terutama bidang lingkungan hidup.

"Norwegia dikenal dengan kemaritimannya. Ini sangat cocok dengan bidang saya di Komisi IV. Saya juga akan memberikan masukan-masukan ke komisi IV tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Norwegia mengenai kepedulian mereka terhadap negara-negara berkembang, tentang pelestarian gambut, dan kebakaran hutan," kata politisi Partai Nasdem itu.

Sebelumnya, lanjut politisi dari dapil



## Deputi Persidangan DPR Terima BPK Australia

**D**PR RI menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan Australia (Australian National Audit Office (ANAO) pada Jumat, (01/04). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat situasi lingkungan Gedung DPR RI disela-sela kunjungan kerja resminya untuk melakukan kerja sama dengan BPK RI.

Delegasi ANAO yang didampingi Kasubbag Hubungan Antar Lembaga BPK RI ini diterima Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti. Menurut Damayanti, kunjungan Ketua BPK Australia ini hanya kunjungan biasa. "Dia hanya ingin melihat langsung gedung DPR Indonesia itu seperti apa. Karena dia mendengar dari teman-temannya bahwa gedung DPR Indonesia itu sangat bagus," ujarnya.

Saat tiba di Gedung DPR RI, rombongan ANAO yang terdiri dari 3 orang yakni Grant Hehir, Tamie Plant dan Andrew Hopope ini langsung dibawa ke Operation Room dan Museum DPR untuk mendengarkan sejarah berdirinya parlemen di ini. Kepada Grant, Damayanti menuturkan bahwa gedung ini sebelumnya oleh Presiden Soekarno

dibangun pada tahun 1965 untuk penyelenggaraan Conference New Emerging Force (Conefo), sebuah kekuatan baru untuk menandingi PBB. "Tapi tidak jadi," katanya.

Kemudian, kata Damayanti, pada 9



Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti berdialog dengan BPK Australia

November 1966, Soeharto, sebagai ketua Presidium Kabinet Ampera, menginstruksikan untuk melanjutkan proyek Gedung Conefo. Bedanya, gedung diubah peruntukannya, yaitu sebagai Gedung DPR/MPR. Di sini Grant diberi penjelasan bahwa selama empat kali

dalam seminggu, Operation Room ini dikunjungi masyarakat untuk mendapatkan edukasi politik tentang DPR.

Setelah mengunjungi Museum, rombongan berkunjung ke Ruang Rapat Paripurna I yang digunakan saat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dan pembacaan nota keuangan setiap tahunnya. Melihat kondisi ruangan ini dan mendengar penjelasan soal tata letaknya,

Grant Herir menyampaikan ketakjubannya.

Setelah itu, rombongan dibawa ke Ruang Rapat Paripurna II yang merupakan ruangan yang rutin dilakukan ketika melakukan pengesahan sebuah keputusan. Selanjutnya, rombongan juga sempat mengunjungi Ruang Badan Anggaran

Menanggapi kunjungan ini, Damayanti mengaku senang dengan adanya

tamu dari luar negeri yang berniat untuk melihat keberadaan Gedung Parlemen di Indonesia "Kita senang karena ada tamu yang datang untuk melihat Gedung DPR. Memang Gedung DPR ini kan konstruksinya termasuk yang unik di dunia. Jadi saya mengharapkan ada banyak tamu yang akan datang seperti ini. Apalagi ini dari pejabat tinggi di Australia," ujarnya.

"Jadi kita juga ingin parlemen indonesia terkenal di luar negeri, baik itu kerjanya, arsitekturnya dan lain-lain," sambungnya.

Terkait pengembangan Museum, Damayanti juga memaparkan akan menindaklanjuti upaya serius untuk mengembangkannya, sehingga bisa menjadi lokasi pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami sejarah DPR.

"Terkait museum, kita juga ingin membuat Museum DPR untuk lebih serius, karena selama ini masih dibilang hanya sebagai pojok kecil. Nah nanti akan diupayakan menjadi lebih besar. Supaya bisa menjadi pusat belajar orang. Jadi ke museum itu bukan hanya sekadar melihat-lihat, tapi juga sebagai tempat orang belajar untuk mengetahui sejarah DPR," pungkasnya.■



Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani bersama Dubes Norwegia

Kalteng ini, Pemerintah Indonesia sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Norwegia untuk penanggulangan kebakaran. "Ada semacam hibah untuk penataan hutan dan lahan gambut. Norwegia ingin berbagi pengetahuan tentang penataan lahan gambut. Bahkan, hutan yang sudah terbakar saja, masih bisa diolah dan memberikan nilai

ekonomis. Kita harus pelajari benar-benar dan kita terapkan di beberapa provinsi yang dilanda kebakaran," tutupnya.■

(mh) foto: rumi/hr

(hs,mp) foto: jay/hr.



## Sambut HUT Ke - 47, P3S Gelar Gebyar Karya UKM

**B**ahagia dan bangga, di tengah para juniornya yang masih berkuat dengan tugas kesetjanaan, senior yang tergabung dalam P3S (Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen DPR RI) masih masih bisa berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti saat membuka Gebyar Karya UKM yang diselenggarakan P3S, Rabu (6/4) di ruang Serbaguna Masjid Baiturrahman DPR RI, Senayan Jakarta.

"Alhamdulillah dalam rangka Ulang tahun P3S DPR RI hari ini, kami masih bisa bertemu kembali dengan para pensiunan yang merupakan senior kami. Saya bangga, di usia anggota P3S yang sudah tidak muda lagi, ada yang di atas 70 dan 80 tahun, tapi masih bisa berkarya menggelar Gebyar Karya UKM ini,"ungkap Win, begitu ia biasa disapa.

Ditambahkan Win yang juga sebagai dewan penasihat P3S ini, dengan menggelar bazar dimana P3S menggandeng para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk memasarkan produknya. Artinya, P3S telah ikut membantu program pemerintah mengembangkan industri kreatif. Hal ini



Sekjen DPR Winantuningtyastiti

menurut Win, dapat menjadi contoh bagi para juniornya, yakni pegawai Setjen DPR yang masih aktif bertugas.

Sementara itu Ketua P3S, Toip Heryanto mengatakan bahwa sejatinya ulangtahun P3S yang ke-47 tahun jatuh pada tanggal 27 April 2016 mendatang. Namun karena pada hari ini, Rabu (6/4) bertepatan dengan pertemuan berkala yang digelar tiga bulan sekali, maka diputuskan untuk memajukan peringatan ulang tahun P3S itu.

"Pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi tidak hanya untuk para anggota P3S sendiri, melainkan juga anggota P3S dengan pegawai aktif di kesetjanaan DPR. Selain menggelar

pertemuan tiga bulan sekali, kami juga mengadakan arisan, wisata bersama dan pengajian,"papar Toip.

Mantan Deputy Administrasi itu juga bersyukur dan berterimakasih akan dukungan Sekjen DPR beserta jajarannya kepada P3S selama ini. Tidak hanya saat peringatan ulang tahun P3S hari ini, namun juga dukungan kepada organisasi ini dalam setiap bulannya.

"Alhamdulillah, di masa kepemimpinan bu Win sebagai

Sekjen, kami (P3S) mendapat dukungan dana untuk kas kami. Tidak hanya itu, saat anggota P3S ada yang meninggal dunia, Sekjen DPR beserta jajarannya juga mengirimkan bantuan ambulans dan pengamanan sampai ke pemakaman. Kami berharap agar dukungan tersebut terus ada meski kelak berganti Sekjen," pungkasnya.

Pada kesempatan itu selain Sekjen DPR hadir pula beberapa pejabat di lingkungan Setjen seperti Kepala Biro Umum Mardian Umar. Terlihat pula tiga mantan Sekjen DPR RI terdahulu yakni Sri Sumaryati Haryanto, Faisal Djamal, dan Nining Indra Saleh diantara anggota P3S lainnya. ■

(ayu), foto : rizka/hr.

## DPR Segera Buka Kantor Satelit GOPAC

**T**erpilihnya Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon secara aklamasi sebagai President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dalam Konferensi GOPAC ke-VI di Yogyakarta Oktober tahun lalu, Parlemen Indonesia berkesempatan menjadi *leading issue* dalam forum internasional dengan dibukanya kantor

satelit sebagai kantor operasional GOPAC seluruh dunia yang berlokasi di Gedung DPR.

Demikian diungkapkan Fadli Zon (F-Gerindra) saat menggelar *executive meeting* dengan Komisaris GOPAC lainnya. "Kami (DPR) sudah mempersiapkan kantor Sekretariat GOPAC untuk ke depan," jelas Fadli saat memimpin rapat eksekutif

GOPAC melalui Conference Call di Ruang Pimpinan DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (05/04) malam.

Dijelaskannya, rapat eksekutif antara Executive Committee GOPAC tersebut merupakan suatu kegiatan rutinitas dua atau tiga bulan sekali yang dilakukan untuk membahas agenda GOPAC baik yang bersifat intern organisasi maupun partisipasi eksternal GOPAC dalam menjalankan tugasnya kedepan.

Selain itu, dengan dibukanya kantor Satelit GOPAC di DPR, Fadli berharap DPR bersama GOPAC akan berkerjasama



## Perkuat FKUB, Salah Satu Cara Atasi Intoleran

Politisi PPP Achmad Mustaqim meminta perlunya penguatan kelembagaan dan memfungsikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai salah satu cara mengatasi munculnya sikap intoleran. Bahkan ia mendesak, penguatan FKUB menjadi bagian tantangan ke depan untuk bisa memperkecil intoleran-intoleran jangka panjang. Dengan demikian, kita semua bisa hidup nyaman berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kalau tidak diantisipasi, intoleran bisa berdampak kepada ekstremisme. Ini yang tidak kita harapkan," papar Achmad Mustaqim saat dihubungi di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Kamis (7/4).

Hal itu dikemukakannya menanggapi masih maraknya gerakan intoleran di negeri ini. Seperti diwartakan, awal bulan ini FPI Riau membubarkan diskusi yang digelar HMI lantaran mengundang tokoh Syiah. Lalu pada Sabtu lalu, massa sejumlah ormas menggeruduk acara Lady Fast 2016 di Studio Survive Garage Bantul, DIY karena diduga sebagai ajang kemaksiatan.

Intinya, lanjut Mustaqim yang juga anggota Komisi VIII DPR ini, harus ada penguatan kelembagaan FKUB disamping struktur pemerintahan melalui Kemenag. Menurutnya, FKUB sebenarnya bisa



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

memiliki peran yang lebih bermanfaat, tetapi butuh pendorong. Pemerintah harus melibatkan di setiap tingkatan strukturnya. "Ini merupakan bagian yang belum disentuh oleh Kemenag agar menjadi program unggulan," jelasnya.

Ditekankan lagi, ke depan negara melalui Kemenag dengan segenap jajaran hingga tingkat terendah, harus menjadi *agent of change* dan *focus* bisa mengajak pihak lain bagaimana kasus intoleran ini bisa dicegah tangkal melalui dua jalur. Yaitu jalur struktural dan non struktural yaitu lembaga non pemerintah FKUB ini.

Dari pengamatan langsung ke daerah, kata Mustaqim, FKUB hanya muncul di

permukaan dan belum menyentuh masyarakat secara langsung sehingga belum ada *link and match* dengan kasus yang terjadi di akar rumput dengan kehadiran forum tersebut. "FKUB masih pada tataran formal legal, sehingga masih terbawa arus kegiatan seremonial saja," tekannya.

Di Dapilnya, sambung Mustaqim, malah sudah terbentuk FKUB sejak tahun 1997 jauh sebelum ada reformasi, di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jateng. Pengurusnya lintas agama, dan salah satu

kecamatan yang tidak pernah ada gejolak. Seharusnya ini bisa dijadikan real model, sebab hingga kini belum ada program yang cukup cerdas menangkap kepentingan ini sebagai sumbu penyelesaian intoleran di seluruh daerah di Indonesia.

Sekarang yang penting membaca intoleransi saat ini dan ke depan. Karena kita sepakat negara demokrasi Pancasila dan negara hukum sebagai konstitusi, maka aspek utamanya bagaimana pranata hukum ini bisa melindungi sekaligus mengantisipasi serta melakukan tindakan tegas, tanpa harus merusak sistem kebangsaan yang kita miliki. ■

(mp), foto : anief/hr.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat conference call

dengan KPK dalam meminimalisir korupsi. "Dalam hal ini juga di parlemen terutama menyangkut masalah legislasi, aturan dan sebagainya. Kita juga sudah beberapa kali mengundang KPK dan saya juga pernah datang kesana untuk meminta dukungan dan mereka menyatakan akan mendukung dan membantu proses ini," ungkap politisi Dapil Jawa Barat V ini.

Seperti diketahui, GOPAC adalah organisasi untuk anggota parlemen dari seluruh dunia dengan visi misi untuk memberantas korupsi. Organisasi non profit ini didirikan pada 2002 sebagai hasil

konferensi global di Ottawa, Kanada. Fadli ditunjuk sebagai Presiden GOPAC dalam sidang board meeting yang dihadiri 5 perwakilan benua dan regional chapter antaranya, Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, Arab, Osenia Karibia dan Amerika Utara.

"Kita (DPR) sudah ikut GOPAC selama beberapa tahun, kita punya *national chapter* atau cabang Indonesia dan sekarang kita menjadi Presiden GOPAC untuk sampai tahun depan. Setelah itu, tentu kita serahkan kepada negara lain," ungkapnya. ■

(ann,mp), foto: Kresno/hr



## DPR Prihatin Soal Tebusan Ke Teroris

Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon menyayangkan sikap pemerintah yang menyerahkan uang kepada kelompok Abu Sayyaf untuk menebus 10 WNI yang disandera.

"Upaya pemerintah sudah cukup intens. Namun opsi yang ditawarkan pemerintah tentang negosiasi pembebasan sandera dengan uang tebusan, membuat kita bertanya-tanya, dan prihatin," ujarnya sebelum rapat paripurna, digedung DPR, Rabu (6/4).

Menurut politikus PDI Perjuangan, dari sisi DPR tentu prihatin dengan kejadian ini, apalagi saat pejabat teras pemerintah menyatakan penyelesaian penyanderaan melalui pembayaran uang tebusan, ditambah uang tebusan itu dibayarkan oleh perusahaan tempat WNI bekerja.

"Pemerintah tidak seharusnya melepaskan masalah tersebut ke perusahaan 10 WNI tersebut bekerja. Karena tidak seharusnya perusahaan itu dilepaskan untuk berhubungan langsung

dengan teroris, ini akan menimbulkan tanda tanya terhadap bangsa, apakah ini yang disebut negara hadir di tengah warga yang mengalami masalah," tuturnya.

Effendi menegaskan bahwa Indonesia negara

berdaulat jadi untuk melepaskan sandera tidak perlu dengan cara membayar tebusan. Menurutnya, TNI mampu membebaskan para sandera.

"TNI kita baik angkatan darat, laut maupun udara memiliki kemampuan (bebaskan sandera). Kalau mereka dilibatkan akan menaikkan moralitas kita,"



Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon

katanya

"Pejabat kita jangan katakan uang tebusan serahkan ke pengusaha. Kalau begitu tidak perlu ada negara, tidak perlu ada TNI. TNI jangan tugasnya menjemput saja, kalau menjemput itu PMI saja. Nanti negara kita masuk kategori yang nego dengan teroris," tambahnya. ■

(rmm), foto: Akse/hr

## UMKM Miliki Potensi untuk Hasilkan Produk Ekspor

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi dan keunggulan kreativitas dalam menghasilkan produk-produk ekspor, sehingga ini juga menjadi upaya untuk penganekaragaman produk ekspor Indonesia.

Hal ini dikatakan Taufik, saat dihubungi Parlemenaria melalui telepon, Kamis (7/4/2016), terkait diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI oleh Pemerintah, pada pertengahan Maret lalu.

Sebagaimana diketahui, dalam paket ini, pemerintah meluncurkan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berorientasi ekspor. Dengan program ini, para pelaku UMKM yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, baik itu dengan mengekspor sendiri barangnya maupun menjualnya kepada perusahaan pengekspor, berhak mendapatkan KUR dengan bunga sembilan persen.

"Namun, upaya untuk mengekspor produk UMKM masih terkendala, terutama masalah pembiayaan, serta masalah dalam kapasitas UMKM yang menyangkut Sumber Daya Manusia, pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat," kata Taufik.

Untuk itu, politisi F-PAN ini meminta Pemerintah untuk memberikan stimulus kepada UMKM untuk meningkatkan ekspor nasional, daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan, hingga meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor.

Sementara terkait kebijakan mengenai sistem Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) untuk mempermudah proses bongkar muat barang di pelabuhan, Taufik berharap kebijakan ini dapat mempercepat pelayanan kegiatan impor atau ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan *dwellling time* melalui peningkatan efektifitas pengawasan melalui integrasi pengelolaan risiko di antara Kementerian dan Lembaga terkait.



## Ikatan Dinas Bisa Memeratakan Distribusi Dokter

**D**istribusi dokter yang tidak merata menjadi masalah klasik di hampir setiap daerah. Padahal, produksi dokter dari berbagai Fakultas Kedokteran Tanah Air melimpah. Para dokter muda diikat dengan dinas dari



Anggota Komisi IX Ali Maher.

pemerintah agar terjadi pemerataan distribusi tenaga dokter di daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Maher mengatakan, masalah seperti ini terus terjadi di hampir seluruh daerah terpencil. Di dapilnya sendiri (Jateng II meliputi Demak, Jepara, dan Kudus) ungkap Maher, sebaran dokter tidak merata. Banyak Puskesmas berdiri tanpa dokter. Padahal, dokter harus selalu ada.

"Apalagi, untuk dokter spesialis jauh dari kata cukup, karena memang masih kurang, baik di kabupaten maupun kabupaten terpencil," ujar Maher di DPR sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Rabu (6/4). Masalah utama tidak meratanya distribusi dokter, sambung Maher, lantaran penghasilan dokter daerah yang sangat minim.

Tidak adanya ikatan dinas yang mengikat para lulusan FK, juga menjadi masalah lain. Para dokter muda pun bingung, harus ke mana

menjalankan praktiknya. Banyak dokter yang ditempatkan di daerah, terpaksa kembali ke kota, karena ingin bekerja lebih nyaman.

"Mereka kembali ke kota, karena merasa lebih nyaman bekerja di kota daripada di daerah terpencil. Apalagi, pendidikan dokter sekarang susah. Setelah lulus, dia akan mengambil pendidikan tambahan. Nah, itu akan memakan biaya, waktu, dan sebagainya. Kalau umur sudah cukup tua, lalu diminta ke daerah, pasti malas," ungkap Maher.

Menurut politisi partai Nasdem ini, untuk memastikan layanan kesehatan jadi lebih baik di daerah, perlu ada ikatan dinas, sehingga setelah lulus dari FK, para dokter muda itu bisa ditempatkan untuk beberapa waktu lamanya di daerah. Dengan begitu, target pemerintah yang menginginkan rasio dokter dengan penduduk, 41 dokter melayani 100.000 orang bisa tercapai. ■

(mh), foto: arrief/hr



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

"Adanya perlakuan pelayanan yang berbeda-beda atas pengguna jasa yang sama di setiap Kementerian dan Lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan inefisiensi dalam kegiatan ekspor impor. Pengelolaan resiko pada Kementerian dan Lembaga juga belum dilakukan secara sistematis dan belum terintegrasi," nilai Taufik.

Untuk kebijakan Dana Investasi Real Estate (DIRE), politisi asal dapil Jawa Tengah itu menilai, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah selama empat tahun belakangan, telah menyebabkan kegiatan real estat menurun sejak Tahun 2014. Sementara sektor real

estat merupakan salah satu sektor padat karya.

"Jumlah DIRE di dalam negeri sangat rendah yaitu hanya ada 1 DIRE yang diterbitkan sejak tahun 2012. Tidak menariknya DIRE di Indonesia disebabkan pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga," analisa Taufik.

Dan untuk kebijakan pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes), Taufik berharap hal ini dapat menjadi upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri. ■

(sf), Foto: andri/fk



## Komisi V DPR Sesalkan Peristiwa Tabrakan Pesawat Batik Air dan TransNusa

Komisi V DPR sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tabrakan antara pesawat TransNusa dengan Batik Air pada 4 April lalu di Bandara Halim Perdanakusuma.

"Kami Komisi V DPR sangat menyesalkan peristiwa tabrakan pesawat pada 4 April kemarin, dan hari ini kami datang ke Bandara Halim, untuk melihat lebih dekat kondisi pesawat Batik Air dan TransNusa yang bertabrakan," kata Wakil

Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena di Bandara Halim, Jakarta, Kamis, (7/4).

Dalam penjelasannya dihadapan wartawan, Bandara Halim ini memiliki tiga fungsi, "Bandara Halim ini adalah bandara *enclave* artinya bandara yang dimiliki militer tetapi digunakan oleh sipil, itu sudah dua fungsi dan fungsi yang ketiga yang sangat penting dan vital adalah bandara ini juga dipakai untuk kegiatan VVIP," terang Michael.

Lebih lanjut, Michael memaparkan, dalam kegiatan internasional, presiden-presiden dari seluruh dunia *take off* dan *landing* di Bandara Halim, "Mestinya dengan adanya tiga fungsi tadi seharusnya aspek keamanan dan keselamatan sudah tidak harus dipertanyakan lagi," tegasnya.

Terlebih lagi, menurut Michael, Bandara Halim tidak memiliki *taxiway*, "Salah satu kekurangan yang sangat vital, di bandara ini tidak memiliki *taxiway*, ini sangat fatal sekali apabila terjadi *take off* dan *landing*," ujarnya.

Kedepan, tambahnya, dengan terjadinya peristiwa tabrakan ini, kedepan baik pemerintah, DPR dan AP II melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan, lebih khususnya terhadap pelayanan bagi sipil, "Karena sipil itu kan



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena

banyak regulasi yang harus dipenuhi," jelas politisi Demokrat ini.

Dalam peninjauannya, terang Michael, Komisi V belum bisa mengambil kesimpulan, siapa yang salah dalam peristiwa tabrakan ini, "Seperti yang kita minta kepada kepala KNKT, supaya bisa mengungkap apa yang menjadi penyebab dan kesalahan dari peristiwa kecelakaan pesawat itu, dan kedepannya agar tidak terulang lagi," tandasnya.

"Bandara Halim adalah bandara VVIP, kita bisa bayangkan Presiden kita Jokowi *take off* dan *landing* di sini, lalu ada peristiwa tabrakan ini, lalu muka kita, wajah kita, potret Indonesia itu didunia internasional mau diletakan dimana," tambahnya.

Untuk itu, kata Michael, Komisi V DPR pun meminta kepada semua *stakeholder*, kedepannya untuk bisa melakukan koordinasi dan pembenahan secara permanen dan komprehensif sehingga tidak terulang kembali, "Jangan terulang lagi, sehingga wajah kita tidak akan tercoreng dimata internasional terlebih khususnya pada dunia penerbangan kita," tegasnya.

Sementara itu, menurut Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo saat mendampingi Komisi V DPR menjelaskan,

dari kejadian senggolan antara pesawat Batik Air dan TransNusa sudah ditangani oleh KNKT. "Nanti kita menunggu hasil investigasi ini, rekomendasinya apa, kita siap akan melakukan perbaikan," tegas Suprasetyo.

Tekait petugas yang bertugas saat kejadian itu, menurut Suprasetyo, dibekukan sementara, "Petugas yang di *suspend* sementara itu, petugas ATC ada 3 orang, petugas towing 2 orang, kemudian teknisi yang ada di pesawat TransNusa ada 2 orang," jelasnya.

Untuk pilotnya, tambah Suprasetyo, di *suspend* maksimal 90 hari untuk penyelidikan, kemudian nanti tes kesehatan dan lain sebagainya sudah bisa dipenuhi akan di *release* kembali.

Ditempat yang sama, Kepala KNKT Soerjanto ketika ditanya wartawan mengenai hasil investigasi KNKT, menilai masih terlalu dini, KNKT masih melakukan penyelidikan melalui pengumpulan data dan SOP, "Saya usahakan secepatnya, tandasnya.

Sebelumnya, Tim Rombongan Komisi V DPR melakukan pertemuan tertutup dengan Dirjen Perhubungan Udara, AP II dan KNKT.

Rombongan Komisi V ke Bandara Halim diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia (F-PKS), Sudjadi (F-PDIP), Sadarestuwati (F-PKS), Anthon Sihombing (F-PG), Daniel Mutaqien S (F-PG), Gatot Sudjito (F-PG), Anton Sukartono Suratto (F-PD), Willem Wandik (F-PD), Hanna Gayatri (F-PAN), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Nurhayati (F-PPP), Ahmad H. M Ali (F-Nasdem), Fauzih Amro (F-Hanura), dan Miryam Haryani (F-Hanura). ■

(nt), foto: naefuroji/hr



## DPR Dorong Perbaikan Sarana Bandara Halim

Setelah terjadi insiden tabrakan antara Batik Air dan TransNusa, DPR langsung melakukan inspeksi ke Bandara Halim Perdanakusuma pada Selasa, (05/04). Inspeksi ini dilakukan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (F-Demokrat), Ketua Komisi V Fary Djemy Francis (F-Gerindra) dan Anggota Komisi VI Refrizal (F-PKS). Dalam inspeksi ini, ketiganya mengoreksi sarana yang ada di bandara ini.

"Memang kedatangan kami ini ingin memastikan agar kecelakaan yang sama tidak terjadi lagi. Kita akan gali soal navigasi dan hal teknis yang menyebabkan tabrakan itu terjadi. Meskipun begitu, alhamdulillah pasca insiden segalanya bisa diselesaikan dengan baik dan bandara hanya ditutup 4 jam," ujar Agus saat tiba di Bandara Halim.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kesiapan sarana prasarana Bandara Halim, salah satunya adalah *Air Traffic Controller* (ATC). Agus menilai ATC di Bandara Halim seharusnya dibantu radar. "Kalau seperti di Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta) itu sudah ditambah radar. Jadi bisa mengetahui dengan jelas pergerakan pesawat," ujar Agus. Sudah saatnya masalah navigasi di Bandara Halim itu diperbaiki. Sehingga pergerakan pesawat bisa dipantau dengan jelas. Alhasil, insiden tabrakan dua pesawat itu tak terulang lagi di masa mendatang.

Setelah melakukan tinjauan langsung ke badan pesawat, Agus menuturkan bahwa ATC di Bandara Halim ini 100 persen hanya mengandalkan visual untuk

memantau pergerakan pesawat, padahal saat malam hari pemantauan visual menjadi tidak maksimal. Dirinya juga mengusulkan agar navigasinya ditambah. "Oleh karenanya, saya juga mengusulkan agar navigasinya ditambah seperti yang di Cengkareng. Walaupun visual tapi dimodifikasi sehingga tahu persis posisi dari pesawat itu berada," ujarnya.

"Memang di dalam undang-undang penerbangan, untuk pengaturan yang ada di bandara itu hanya dengan visual. Tetapi kalau di Cengkareng (Soetta) itu sudah ditambah lagi radar, jadi bisa mengetahui dengan jelas," sambungnya

Tanpa radar, menurutnya akan sulit untuk memantau pergerakan pesawat, khususnya pada malam hari. Agus pun menilai tabrakan antara Batik Air dan TransNusa di Bandara Halim Perdanakusuma terjadi di saat kurangnya pemantauan visual oleh ATC. "Jadi ya mungkin secara visual menurut saya kurang begitu bisa, karena kan sudah malam melihat lampunya, apakah ini sudah sampai di tikungan atau belum, sehingga menurut saya masalah navigasi harus di permodern," ujarnya.

Dirinya juga mengapresiasi kinerja pemadam kebakaran yang bekerja dengan sigap sehingga kebakaran hanya berlangsung sebentar dan tidak menjalar ke tempat yang lebih luas. "Pemadam kebakaran disini bertindak cepat sehingga kebakarannya tidak lama," paparnya.

Dalam inspeksi yang sama, Fary Djemy Francis juga berupaya memastikan agar

keselamatan penumpang menjadi hal yang harus dijamin. "Selama ada insiden maka kita harus memastikan agar keselamatan penumpang itu harus dijamin. KNKT saya minta juga untuk bisa melakukan investigasi secara mendalam dan memberikan rekomendasi lebih tajam. Jangan memberikan rekomendasi yang sifatnya umum," paparnya.

Ketua Komisi V itu juga meminta agar Bandara Halim bisa mengelola secara lebih khusus, karena bandara ini adalah gabungan dari penerbangan sipil, militer dan VVIP. "Terkait hal itu maka diperlukan adanya perlakuan khusus dari bandara. Nah kita juga tadi sempat menyayangkan bahwa General Manager disini belum ditetapkan, tadi kita tanya alasan hal itu terjadi, namun katanya ada penunjukan dengan syarat khusus bagi General Manager di Halim ini," jelasnya.

Selain itu, dirinya juga sepakat untuk segera dilakukan Rapat Gabungan antara Komisi V dan VI untuk membahas persoalan ini agar ada satu pengelolaan yang khusus terkait siapa leadernya dan siapa yang bertanggung jawab penuh atas insiden ini agar sesuai amanat UU penerbangan.

Dalam kesempatan yang sama, Refrizal menuturkan bahwa pengelolaan Bandara Halim ini harus tegas, hal ini menyangkut beragam penerbangan yang diperbolehkan disini. "Jika bandara ini sudah tidak layak menjadi penerbangan sipil ya jangan dipakai untuk penerbangan sipil lagi. Saya minta begitu," ujarnya.

Dirinya juga mempertimbangkan kepadatan yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta jika penerbangan sipil di Bandara Halim ini ditutup. "Ini memerlukan evaluasi yang panjang. Jika kita tutup sekarang ya emosial namanya," sambungnya.

Meskipun begitu, Refrizal tetap menilai pengelolaan Bandara Halim sudah baik secara keseluruhan dan selalu meningkat setiap tahunnya. "Pengelolaan Bandara Halim sudah cukup bagus dan meningkat, cuma kan memang diperlukan pembagian tugas. Misalnya, Angkasa Pura bertugas untuk mengurus bandara, tapi kalau yang mengatur parkir pesawat itu bukan tugas Angkasa Pura. Nah setiap institusi ada fungsi dan tugasnya masing-masing yang memerlukan sikap saling sinergi," pungkasnya. ■



# BERITA BERGAMBAR



Tim Komisi V DPR RI saat meninjau kondisi pesawat Batik Air usai insiden dengan TransNusa di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (7/4) foto: Naefuroji



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berorasi dalam acara Milad ke-18 KAMMI Palembang, Selasa (5/4) Foto: Sofyan



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima cenderamata dalam acara Milad ke-18 KAMMI Palembang, Selasa (5/4) Foto: Sofyan



Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir meninjau infrastruktur pembangunan Papua di Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (31/3) Foto : Iwan

